

STRATEGI PENGEMBANGAN KABUPATEN KONAWE SELATAN MENJADI KABUPATEN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

Risnawati K¹

¹ Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi,
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Jl. Sultan Alauddin No. 63, Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia. 92113
Email : risnawati.k@uin-alauddin.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini tentang Strategi Pengembangan Kabupaten Konawe Selatan menjadi Kabupaten yang Berwawasan Lingkungan. Pokok permasalahannya adalah bagaimana Strategi Pengembangan Kabupaten Konawe Selatan menjadi Kabupaten yang Berwawasan Lingkungan. Masalah ini dengan melihat Kebijakan spasial dan perkembangan Kabupaten Konawe Selatan yang Saat ini pembangunannya sedang berkembang, dengan demikian penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif Alat analisis ini digunakan untuk menganalisis Strategi Pengembangan Kabupaten Konawe Selatan menjadi Kabupaten yang Berwawasan Lingkungan dengan menggambarkan kebijakan dan peran wilayah pengamatan atau sesuai data yang diperoleh yaitu mengklasifikasikan dan menyajikan data dalam bentuk tabel, penguraian dan gambar dan analisis ini dilakukan untuk mempertimbangkan Strategi Pengembangan Kabupaten Konawe Selatan menjadi Kabupaten Berwawasan Lingkungan.

Kata Kunci : Strategi, Pengembangan, Lingkungan

A. PENDAHULUAN

Kegiatan usaha di beberapa wilayah kabupaten mengalami perkembangan yang cukup pesat. Pemerintah dalam hal ini telah melakukan berbagai upaya dalam bentuk program pembangunan termasuk berbagai sistem pembangunan yang terpadu. Salah satu diantaranya adalah pengembangan yang memberikan arahan fungsi dan peran Kabupaten sesuai Rencana Tata Ruang yang ada. Penanganan pembangunan dalam kerangka memenuhi tuntutan pertumbuhan maupun kebijaksanaan pembangunan yang ada khususnya di Kabupaten Konawe Selatan, terus dikaji, dievaluasi, dan dilengkapi.

Pembangunan di Kabupaten Konawe Selatan dalam menjawab tantangan kebutuhan masyarakat telah banyak dilaksanakan, akan tetapi pembangunan tersebut lebih ditekankan kepada pemenuhan kebutuhan dasar saja (basic need approach) dan perlu peningkatan pada peletakan dasar bagi pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Pembangunan fisik dalam penyediaan sarana dan prasana dasar dan pengembangan kawasan fungsional strategis termasuk pengembangan di Kabupaten Konawe Selatan tentunya akan banyak mengalami hambatan, jika dalam pelaksanaannya tidak terintegrasi antara satu sektor dan sektor lainnya termasuk penanganan dan optimalisasi sumberdaya yang

berbeda antara bagian kawasan yang satu dan bagian yang lain, khususnya penyiapan berbagai fasilitas perkotaan beserta komponen utama suatu kawasan. Dengan demikian, dibutuhkan suatu strategi penanganan pembangunan wilayah, khususnya penyediaan dan penanganan Ruang Terbuka Hijau (RTH), alokasi pemanfaatan ruang komponen aktivitas kawasan yang tidak saja berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan dasar, akan tetapi pemenuhan kebutuhan untuk terselenggaranya fungsi wilayah dalam suatu sistem, sehingga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan akan tercapai dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Undang-undang tentang Bangunan Gedung mengamanatkan bahwa keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya harus mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan gedung dan ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya.

Secara umum ruang terbuka publik terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau, ruang terbuka hijau (RTH) adalah bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi guna mendukung fungsi ekologis, sosial budaya dan arsitektural yang dapat memberi manfaat ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakatnya, antara lain :

1. Fungsi ekologis, RTH dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan pengatur iklim mikro.
2. Fungsi sosial budaya, keberadaan RTH dapat memberikan fungsi sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi dan sebagai tetenger (landmark) kota.
3. Fungsi arsitektural, RTH dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan kota melalui keberadaan taman-taman kota dan jalur hijau jalan kota.
4. Fungsi ekonomi, RTH sebagai pengembangan sarana wisata hijau perkotaan yang dapat mendatangkan wisatawan.

Ruang terbuka hijau (RTH) menjadi elemen penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan. Penyediaannya didukung oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mensyaratkan setiap unit wilayah perencanaan untuk menyediakan RTH sebesar 30% dari luas wilayah yang terdiri dari ruang publik sebesar 20% dan ruang privat sebesar 10%. Perkembangan suatu kota yang kian dinamis, mengakibatkan wilayah atau kawasan perkotaan mengalami perubahan akibat intensitas penyelenggaraan pembangunan yang cukup tinggi. Perluasan wilayah perkotaan berimplikasi pada munculnya kawasan-kawasan pengembangan baru akibat tekanan jumlah penduduk yang terus meningkat tiap tahun disamping kebutuhan kawasan-kawasan primer kota. Sehingga untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang kota sangat diperlukan adanya penyiapan dan penanganan Ruang Terbuka Hijau (RTH) guna mengantisipasi kemungkinan kerusakan lingkungan yang cukup tinggi. Hingga saat ini salah satu usaha untuk menyelesaikan masalah pembangunan kota tersebut adalah pengembangan pusat-pusat aktivitas baru ke daerah pinggiran kota, akibatnya adalah ekspansi atau perluasan wilayah khususnya dalam kerangka pengembangan kawasan fungsional strategis. Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal tersebut terutama di kabupaten Konawe Selatan dibutuhkan penanganan bersama dan terintegrasi, dalam rangka

penyiapan berbagai kegiatan pembangunan sebagai akibat perkembangan suatu wilayah.

Dinamika perkembangan Kabupaten Konawe Selatan memiliki potensi pengembangan RTH yang masih dapat dikendalikan, terutama pada kawasan-kawasan, sehingga memerlukan tindakan pengendalian terutama dalam hal pengalokasian pemanfaatan ruang kawasan. Atas dasar pemikiran tersebut dipandang perlu untuk merumuskan strategi pengembangan Kabupaten Konawe Selatan menjadi kabupaten yang berwawasan lingkungan untuk digunakan sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang terbuka hijau dengan fokus kajian diarahkan pada pengembangan kawasan yang diprioritaskan serta mengalokasikan berbagai kegiatan RTH untuk mewujudkan sinergitas dengan kawasan sekitarnya sehingga memiliki interkoneksi dengan kawasan fungsional strategis lainnya di wilayah Kabupaten Konawe Selatan.

B. METODE PENELITIAN

1. Lokasi dan Waktu

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Konawe Selatan. Penetapan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan pembangunan yang terjadi saat ini yang harus seimbang dengan penyediaan RTH yang tentunya sangat berpengaruh dalam mendukung perkembangan Kabupaten Konawe Selatan.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan atas dua jenis data yaitu :

- a. Data Kualitatif adalah jenis data yang tidak berupa angka tetapi berupa kondisi kualitatif objek dalam ruang lingkup penelitian baik dalam bentuk uraian kalimat ataupun penjelasan. Data kualitatif yang dimaksud meliputi kondisi lokasi dan kebijakan yang berlaku.
- b. Data Kuantitatif adalah jenis data yang berupa angka atau numerik yang bisa diolah dengan menggunakan metode perhitungan yang sederhana. Data kuantitatif yang dimaksud adalah luas wilayah dan jumlah penduduk.

Menurut sumbernya data terbagi atas dua yaitu :

- a. Data primer dikumpulkan melalui survai primer yang dilakukan melalui pengamatan dan pengukuran atau perhitungan langsung (observasi) di lapangan.
- b. Sumber sekunder merupakan sumber data yang berasal dari instansi yang terkait dengan studi untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan untuk kegiatan analisis. Selain itu, data sekunder lainnya adalah studi literatur untuk mendapatkan literatur yang berkaitan dengan studi. Data sekunder yang dibutuhkan antara lain:
 - 1) Data RTH di Kabupaten Konawe Selatan
 - 2) Data Demografi diperoleh dari BPS Kabupaten Konawe Selatan
 - 3) Kondisi Fisik Dasar Kabupaten Konawe Selatan

3. Metode Analisis

Adapun metode analisis yang dipergunakan dalam menganalisis masalah yakni :

a. Metode Kualitatif

Analisis kualitatif adalah metode yang bersifat deskriptif yang dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian dengan menggambarkan atau menguraikan secara jelas kondisi yang terjadi di lokasi penelitian.

b. Metode Kuantitatif

Analisis ini dilakukan dengan cara menggunakan angka-angka statistik untuk menguatkan uraian deskriptif terhadap data-data yang telah diperoleh.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Kabupaten Konawe Selatan

Secara astronomis Konawe Selatan terletak antara 030 58' dan 040 31' Lintang Selatan, antara 1210 58' dan 1230 16' Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Konawe Selatan memiliki batas-batas: Utara – Kabupaten Konawe dan Kota Kendari; Timur - Laut Banda dan Laut Maluku; Selatan - Kabupaten Bombana dan Kabupaten Muna; Barat - Kabupaten Kolaka Timur, dengan luas wilayah 5.779,47 Km², atau 15,15 persen dari luas wilayah daratan Sulawesi Tenggara yaitu 38.140 Km². Sedangkan luas wilayah perairan (laut) adalah mencapai 9.368 Km², dengan panjang garis pantai mencapai ± 200 Km. Dengan demikian luas wilayah daratan dan laut mencapai 15.147,47 Km². Berdasarkan luas tersebut, Kabupaten Konawe Selatan merupakan wilayah potensial untuk pengembangan sektor pertanian dan kelautan dengan luas daratan 38,15 % dan laut 61,85 %.

2. Kondisi Fisik Wilayah

a. Topografi

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Konawe Selatan meliputi dua bagian yaitu ketinggian wilayah, yang diukur dari permukaan laut (elevasi), dan kemiringan lereng/tanah (slope).

Ketinggian wilayah di kabupaten ini didominasi oleh ketinggian yang berkisar antara 100-500 meter dari permukaan laut (mdpl), atau sebesar 39,38% dari jumlah luas wilayah Kabupaten Konawe Selatan.

b. Geologi

Kabupaten Konawe Selatan yang berada di bagian Selatan Jazirah Sulawesi Tenggara merupakan wilayah yang didominasi oleh topografi wilayah yang landai, perbukitan hingga pegunungan. Bentuk lahan tersebut memberikan gambaran terhadap jenis tanah yang ada pada daerah tersebut.

Wilayah Kabupaten Konawe Selatan memiliki variasi jenis tanah yang meliputi jenis Latosol, Podzolik, Organosol, Mediteran, Aluvial serta tanah Grumosol.

3. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan berkaitan dengan kegiatan manusia pada bidang lahan tertentu. Penggunaan lahan pada suatu wilayah merupakan wujud hubungan

antara manusia dengan lingkungannya. Secara makro, penggunaan lahan di Kabupaten Konawe Selatan meliputi: penggunaan untuk vegetasi baik tanaman yang dibudidayakan maupun non budidaya dan penggunaan non vegetasi.

Penggunaan lahan di Kabupaten Konawe Selatan dibedakan menjadi: lahan sawah, lahan untuk bangunan dan halaman sekitarnya, tegalan/kebun/ladang/huma, padang rumput, tambak/kolam/empang, lahan untuk tanaman kayu-kayuan rakyat, hutan negara, perkebunan, lahan yang sementara tidak diusahakan, rawa yang tidak ditanami dan lain sebagainya. Luas lahan menurut penggunaannya didominasi peruntukan kawasan hutan yang terdiri dari hutan negara dan hutan rakyat.

4. Kependudukan

Berdasarkan proyeksi penduduk Interim 2020–2023, penduduk Kabupaten Konawe Selatan tahun 2022 sebanyak 317.826 jiwa yang terdiri atas 162.949 penduduk laki-laki dan 154.877 penduduk perempuan. Dibandingkan dengan hasil SP2020 tahun 2020, penduduk Kabupaten Konawe Selatan pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 3,02 persen. Secara umum, penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan yang ditunjukkan oleh besaran sex ratio sebesar 105,00. Dengan luas wilayah 4.237,74 km², secara rata-rata setiap km² wilayah Konawe Selatan ditinggali sekitar 75 orang penduduk. Seiring dengan persebaran penduduk tiap kecamatan, Kecamatan Ranomeeto dengan persentase penduduk sebesar 6,96 persen memiliki tingkat kepadatan tertinggi mencapai 244,97 jiwa/km². Sementara tingkat kepadatan terendah di Kecamatan Laonti sebesar 28 jiwa/km² dengan persentase penduduk sebesar 3,30 persen. Dilihat dari piramida penduduk Konawe Selatan tahun 2022 dikategorikan sebagai tipe ekspansif, dengan sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur muda. Hal ini mengindikasikan angka kelahiran yang cukup tinggi dan ditunjukkan oleh lebarnya dasar piramida.

Dari sisi Ketenagakerjaan, pada tahun 2022 terdapat 234.502 orang penduduk usia 15 tahun keatas. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mencapai 69,46 persen. Jumlah penduduk yang bekerja di tahun 2022 tercatat sebanyak 158.070 orang, yang terdiri dari 100.224 orang laki-laki dan 57.846 orang perempuan. Sebagian besar bekerja pada sektor pertanian (34,93 persen), dan status pekerjaan utama adalah berusaha sendiri (26,17 persen). Angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja atau biasa disebut pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2022 tercatat sebesar 2,95 persen. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021 dengan TPT sebesar 2,14 persen.

5. Analisis Faktor Pendorong Peningkatan RTH

Suatu tendensi umum bahwa peranan ruang-ruang terbuka sebagai tempat rekreasi semakin penting bagi kehidupan kota, dan kebutuhan akan fasilitas-fasilitas tersebut terus meningkat. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi tendensi tersebut, yaitu:

a. Faktor Pertambahan jumlah penduduk

Proses urbanisasi yang tinggi menyebabkan meningkatnya jumlah fasilitas-fasilitas yang harus disediakan bagi masyarakat termasuk ruang-ruang

terbuka. Marion Clowsor mengatakan bahwa efek multiplikatif daripada penambahan penduduk itu terhadap penambahan ruang-ruang terbuka lebih kurang ekivalen, artinya setiap kelipatan jumlah penduduk akan mengakibatkan kelipatan yang sama pada jumlah ruang terbuka yang di butuhkan.

b. Bertambahnya waktu-waktu luang

Bertambahnya waktu luang mengakibatkan semakin besarnya kesempatan untuk berekreasi. Waktu luang yang tren digunakan saat ini adalah bersifat *outdoor* (di luar ruangan), tetapi karena keterbatasan ruang terbuka maka cenderung yang terjadi *indoor* (di dalam ruangan).

c. Kemampuan penduduk yang menurun untuk menyediakan fasilitas-fasilitas rekreasi di luar sendiri

Mayoritas masyarakat Indonesia mengalami penurunan real income menyebabkan kemampuan untuk mengeluarkan biaya rekreasi otomatis juga menurun. Harga lahan yang terus meningkat di dalam kota, menyebabkan penduduk tidak mampu menyediakan fasilitas-fasilitas rekreasi di luar bagi dirinya sendiri. Jadi pemerintah kota harus dapat menyediakan lebih banyak ruang terbuka untuk umum.

d. Intensifikasi pembangunan kota

Daerah perumahan yang padat dan kondisi buruk, mendesak untuk berekreasi di rumah berkurang dan penduduk menginginkan untuk banyak variasi/rekreasi di luar rumah mereka.

e. Bertambahnya bentuk-bentuk rekreasi yang di butuhkan/ dilakukan penduduk

Bentuk rekreasi yang semula di rumah berkembang menjadi rekreasi keluar lingkungan rumah hingga menjadi suatu kebutuhan untuk menikmati lingkungan yang asri dan indah.

f. Mobilitas penduduk yang semakin besar.

Pergerakan yang mudah dalam mencapai tempat rekreasi di dalam kota menyebabkan keinginan masyarakat melakukan perjalanan ketempat-tempat yang mereka inginkan.

6. Analisis Strategi Wilayah Kabupaten Menjadi Kabupaten yang berwawasan Lingkungan

Untuk mencapai Ruang Terbuka Hijau (RTH) 30% dari luas wilayah perkotaan yang berwawasan lingkungan, maka Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Menetapkan kawasan yang tidak boleh dibangun (Preservasi)

Menentukan daerah-daerah yang diperkirakan sensitif terhadap perubahan. Daerah yang sensitif harus dipreservasi atau dikonservasi agar fungsi lingkungan tetap terjaga. Daerah tersebut antara lain :

- Daerah satwa liar, daerah dengan keanekaragaman hayati tinggi.
- Daerah genangan dan penampungan air hujan (*water retention*)
- Daerah rawan longsor, tepian sungai sebagai pengaman ekologis, dan daerah-daerah yang memiliki nilai pemandangan tinggi

b. Menambah dan membangun lahan hijau baru.

Untuk menambah kuantitas RTH pemerintah daerah dapat membeli lahan untuk memperbanyak taman lingkungan, taman kota, taman makam, lapangan olahraga, hutan kota, kebun raya dan situ danau buatan.

c. Mengembangkan koridor hijau/jalur hijau kota

Penghijauan secara massal untuk menciptakan koridor hijau atau jalur hijau kota seperti :

- Jalur hijau jalan, jalur hijau sempadan sungai, tepian badan air situ, saluran umum tegangan tinggi.
- Jalur hijau dapat dikembangkan sebagai *urban park connector*.

d. Mengakuisisi RTH privat, menjadikan bagian RTH Kota Publik

Mengembangkan dan mengendalikan RTH privat menjadi RTH Kota / Publik dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- Penerapan Koefisien Dasar Hijau (KDH) pada lahan-lahan privat yang dimiliki masyarakat dan swasta diterapkan pada pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- Pengembang perumahan diminta untuk memenuhi kewajiban penyediaan RTH publik, minimal 20% berupa taman lingkungan, jalur hijau dan jenis RTH lainnya.

e. Peningkatan kualitas RTH Kota/Publik melalui refungsi RTH eksisting.

Mengembalikan fungsi RTH yang sebelumnya berfungsi bukan RTH, sehingga dapat meningkatkan fungsi ekologisnya. Upaya tersebut dapat berupa:

- Refungsionalisasi RTH eksisting sempadan sungai, sempadan jalan, resapan air dan lainnya menjadi jalur hijau.
- Penanaman rumput pada taman-taman lingkungan yang telah dilakukan perkerasan agar mempunyai daya serap air yang lebih besar.

f. Menghijaukan Bangunan (Green Building)

Keterbatasan lahan telah mendorong pengembangan daerah hijau tidak dipermukaan tanah saja. Perlu diintroduksi pembangunan taman atap (*green roof, roof garden*) dan dinding hijau (*green wall, vertical garden*) pada bangunan. Penghijauan bangunan terbukti mampu menurunkan suhu kota dan dapat menyerap karbon dioksida sekaligus meningkatkan estetika bangunan.

g. Peningkatan Peran Masyarakat sebagai komunitas hijau (Green Community)

Untuk mewujudkan RTH minimal 30% dari luas kota maka partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Untuk itu perlu *membentuk* komunitas hijau dan dilibatkan dalam program pengembangan kota hijau.

h. Menyusun kebijakan yang berwawasan lingkungan.

Pemerintah Daerah dan DPRD perlu menempatkan masalah RTH sebagai salah satu isu penting dalam pembahasan anggaran dan program pembangunan yang berkelanjutan. Perlu secepatnya menyusun Peraturan Daerah tentang RTH agar perencanaan pembangunan RTH memiliki kekuatan hukum yang tegas dan jelas.

7. Strategi Penyediaan RTH

Kebijakan umum untuk menyediakan ruang terbuka hijau telah berkembang dari waktu ke waktu. Setidaknya terdapat tiga strategi kebijakan yang berimplikasi pada strategi teknis yang ditempuh untuk menyediakan ruang terbuka hijau di Kabupaten Konawe Selatan. Ketiga strategi tersebut adalah (a) mengalokasikan fungsi kawasan lindung dan melakukan perlindungan terhadap kawasan tersebut; (b) memanfaatkan jalur pada jaringan jalan dan utilitas sebagai sarana penyediaan jalur hijau; (c) melakukan pengaturan kepadatan bangunan. Alokasi kawasan lindung dapat dilakukan dengan menyediakan hutan kota dengan membebaskan daerah sempadan sungai dari bangunan dan memulihkan lahan yang telah beralih fungsi menjadi fungsi RTH kembali. Kabupaten Konawe Selatan telah menetapkan ruang hijau dalam bentuk lahan sempadan, rawa, lahan konservasi sebagai kawasan lindung untuk penyediaan RTH. Strategi kedua dapat dilaksanakan dengan mengoptimalkan pembentukan koridor jalur hijau di sepanjang jalur jalan, jalan pedestrian, sempadan sungai, tepidan badan air, dan SUTET Strategi terakhir dapat dilakukan dengan mengatur kepadatan dengan menetapkan KDH minimal 20% pada kawasan pusat.

D. PENUTUP

Dari hasil pembahasan sebelumnya maka dapat dirumuskan kesimpulan yakni Kabupaten Konawe Selatan memiliki potensi RTH sehingga dalam perumusan alternatif rencana penanganan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Konawe Selatan harus dilengkapi dengan rumusan dan strategi pembangunan dan pengelolaan pembangunan Potensi RTH yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara, I.G.Y.dkk, 2009. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam Tata Ruang Kota Tabanan. Bali: Skripsi Jurusan Pendidikan Geografi, Undiksha Singaraja.
- Badjuri, Abdulkahar dan Yuwono, T., 2002. Kebijakan Publik Konsep dan Strategi, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Dunn, W.N., 1998. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwihatmojo, R., 2010. Ruang Terbuka Hijau Yang Semakin Terpinggirkan. Bogor: Badan Informasi Geospasial (BIG). Available at: [http://www.bakosurtanal.go.id/assets/download/artikel/BIG RuangTerbukaHijauyangSemakinTerpinggirkan.pdf](http://www.bakosurtanal.go.id/assets/download/artikel/BIG_RuangTerbukaHijauyangSemakinTerpinggirkan.pdf).
- Dwiyanto, Agung, 2009. Kuantitas dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau di Permukiman Perkotaan. *Journal Teknik*, 30(2), pp.88–93.
- Hadi, S.P., 2013. Manusia dan Lingkungan. Cetakan II., Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Isfriana, Fatmi dan Kustiawan, Iwan, 2012. Optimalisasi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Privat di Kota Cimahi. Bandung: Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota B SAPPK V3N2, ITB.

Risnawati K, Strategi Pengembangan Kabupaten Konawe Selatan Menjadi Kabupaten Yang Berwawasan Lingkungan

Joga, Nirwono dan Ismaun, I., 2011. RTH 30%! Resolusi (Kota) Hijau, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Mulyawan, Iwan, 2015. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai Nilai Tambah pada Kawasan Perumahan di Perkotaan Kuningan. Kuningan: Bappeda.